



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
UNIT KERJA : DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. ALI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 513709

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.155.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/77 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 5.440 m2/144 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. Tanah Seluas 80.000 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 120.000 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
6. Tanah Seluas 170.000 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
7. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
8. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/60 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **950.000.000**



1. MOBIL, HINO DUTRD DAMTRUK Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 175.000.000
2. MOBIL, TOYOYA HILUX 2.DL M/T Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 80.000.000
3. MOBIL, SUZUKI OPENCAP Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
145.000.000
4. MOBIL, FORTUNER FORTUNER Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 550.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	203.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	16.500.171
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.325.000.171

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.325.000.171

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.